



PEMERINTAH
KABUPATEN MALINAU

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA (RENJA)



SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah dan rahmat-Nya yang begitu besar, dalam segala proses penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah ini hingga selesai. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau menyusun Rencana Kerja yang merupakan langkah awal untuk menindaklanjuti kewajiban Instansi Pemerintah umumnya dan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau pada khususnya, dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya baik kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau maupun kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Tujuan dibuatnya Rencana Kerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau ini adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi serta kebijakan lainnya dengan merumuskan program / kegiatan dan Pembangunan sebagai langkah dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau.
2. Memberikan gambaran tentang hasil pengendalian pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun 2023.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malinau, 06 Juli 2023

Sekretaris Daerah
Kabupaten Malinau,



Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19740914 199803 1 002

DAFTAR ISI

Sampul Depan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Gambar	v
BAB I . PENDAHULUAN	01
1.1. Latar Belakang.....	01
1.2. Landasan Hukum.....	02
1.3. Maksud dan Tujuan	03
1.4. Sistematika Penulisan.....	04
BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...	05
2.1.A Pengolahan Data dan Informasi.....	05
2.1.B Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	05
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah	28
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD	29
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Musrenbang, POKIR dll)	39
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	48
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	48
3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah.....	48
3.2.1 Tujuan	48
3.2.2 Sasaran	49
3.3 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Prioritas)	50
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	56
BAB V. PENUTUP	64

DAFTAR TABEL

Tabel T-C.29. Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Malinau Tahun Lalu;

Tabel T-C.2.2. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau;

Tabel 2.2.1. Target Kine

rja Capaian Program Renstra Dan Estimasi Realisasi Capaian Target
Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Dan 2024;

Tabel 2.2.2. Rencana Pagu Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024;

Tabel T-C.31. Review Terhadap Rancangan Akhir Renja Tahun 2024;

Tabel T-C.32. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Musrenbang, POKIR dll);

Tabel T-C.33. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025;

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024;

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2.1	Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau	17
Gambar 3.2.1	Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Dokumen RENJA yang disusun setiap tahunnya memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1 dan 2) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjelaskan bahwa setiap Perangkat Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA - PD) yang berpedoman kepada RENSTRA Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau.

Penyusunan RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini adalah untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Untuk itu Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 yang tetap menyesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih Kabupaten Malinau periode 2021-2026.

RENJA Sekretariat Daerah Tahun 2024 juga berpedoman pada Tupoksi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 55 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Selanjutnya mengingat RENJA Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau merupakan komitmen bersama yang terencana, sistematis dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, maka diharapkan dapat menjadi dasar dan acuan

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dengan tetap mempertimbangkan prioritas-prioritas program/kegiatan serta pengendalian pelaksanaannya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum yang mendasari penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 3004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L);
7. Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang (Bagi OPD yang melaksanakan urusan wajib terkait pelayanan dasar);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Kepmen Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Malinau tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 Nomor 28.1 Tahun 2021 tertanggal 14 November 2021.
12. Peraturan Bupati Malinau Nomor 10 Tahun 2023 tertanggal 12 Juli 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2024 dimaksudkan sebagai Dokumen Perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, sehingga program dan kegiatan berjalan secara sistematis, efektif dan efisien pada tahun Anggaran 2024 yang akan datang.

Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini adalah untuk menjaga konsistensi antara program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah yang telah disusun dengan kebijakan pada RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 dengan meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran.

Adapun tujuan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau adalah :

1. Sebagai pedoman atau acuan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai tugas pokok dan fungsinya guna mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau, sehingga kegiatan yang dilaksanakan lebih terarah dan dilaksanakan secara konsisten sehingga target dan indikator kinerja yang ditetapkan tercapai dengan baik;
2. Acuan dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024;

3. Sebagai tolok ukur keberhasilan capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau selama Tahun Anggaran 2023 dan sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya;
4. Untuk mewujudkan sinergi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rancangan Akhir Rencana Kerja ini meliputi :

- *BAB I PENDAHULUAN*
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- *BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU*
 - 2.1.A Pengolahan Data dan Informasi
 - 2.1.B Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Musrenbang, POKIR dll)
- *BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH*
 - 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah
 - 3.2.1 Tujuan
 - 3.2.2 Sasaran
 - 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Prioritas)
- *BAB IV RENCANA KEJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH*
- *BAB V PENUTUP*

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 A. Pengolahan Data dan Informasi

Kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf, dipimpin Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016, dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
- b. Pengkoordinasian Pelaksanaan Tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
- d. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain yang Diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya.

Adapun Informasi lain terkait Kinerja Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau meliputi :

- a. Menyalurkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam, Kebakaran, Dukacita PNS/Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat;
- b. Meningkatkan Mutu SDM Bidang Keagamaan;
- c. Pengembangan Ekonomi Daerah, Melalui Perdagangan, Usaha Daerah, dan Pertanian;
- d. Pengawasan Peredaran Distribusi LPG/BBM;
- e. Menangani Sanggah Banding dari penyedia Terhadap Proses Pelelangan;
- f. Menangani Sanggah Banding dalam Pengadaan Barang;
- g. Menangani Sanggah Banding dalam Pengadaan Jasa Konsultasi dan Jasa Lainnya.

2.1 B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD dan RENJA Pemerintah Daerah maka setiap Dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolok ukur capaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Mengingat tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Selanjutnya realisasi program dan kegiatan Tahun 2023 sampai dengan 2024 serta perkiraan realisasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.29 :

Tabel. T-C. 29

Evaluasi Terhadap Hasil Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Malinau Tahun Lalu;

Kode	Urusan/Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan		OPD
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah									
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	1	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat Daerah Kab. Malinau	1980	0	165	165	100	165	330		SEKRETARIAT DAERAH
	2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	0	18	18	100	20	36		BAPERKEU
	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	47	0	47	47	100	47	94		AD.PEMB
	4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100	0	100	100	100	100	200		AD.PEMB
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	5	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	0	2	2	100	4	6		BAPERKEU
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	0	1	1	100	1	2		BAPERKEU

			7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Buku Laporan Kegiatan Belanja Pembangunan Kabupaten Malinau	432	0	40	40	100	72	144	ADPEM
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
			8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan sesuai Kebutuhan	15	0	6	6	100	0	6	BAPERKEU
			9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang sangat perlu dilakukan	88	0	20	20	100	20	40	SEKRETARIAT DAERAH
			10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan		0	20	20	100		40	TAPEM
			11	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan Material Perkantoran yang disediakan		0	23	23	100		46	AD.PEMB
			12	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan		0	4	4	100		8	AD.PEMB
			13	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia dalam setiap rapat internal		0	8	8	100		16	AD.PEMB
			14	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang diterima setiap sub bagian		0	11	11	100		22	PROKOMPIM
			15	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan		0	1	1	100		2	PROKOMPIM
			16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang diterima setiap Sub Bagian		0	27	27	100		54	PSDA
			17	Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK yang diterima setiap sub bagian		0	10	10	100		20	HUKUM
			18	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan		0	9	7	100		16	UMUM
			19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan		0	8	8	100		16	UMUM
			20	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan		0	6250	6.250	100		12500	UMUM
			21	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan Material yang disediakan		0	65	43	66,15		108	UMUM
			22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD		0	15	1	6,67		16	UMUM
				Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase barang milik daerah yang diadakan								

			23	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan		0	4	4	100		8		UMUM
			24	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan		0	6	6	100		12		UMUM
			25	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang diadakan		0	7	7	100		14		UMUM
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Jumlah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan									
			26	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah cinderamata untuk Pejabat Negara /Dep/LPLN /LN yang berkunjung ke Kab. Malinau		0	4	4	100		8		PROKOMPIM
			27	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Ukuran spanduk/Baliho bahan publikasi untuk informasi kemasyarakatan		0	1	1	100		2		PROKOMPIM
					Jumlah media informasi pembangunan daerah		0	5	5	100		10		PROKOMPIM
				Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara									
			28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang di Rawat dan di Pelihara Secara Berkala		0	9	9	100,00		18		KESRA
			29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas dalam Kondisi baik		0	3	3	75,00		6		PEREKONOMIAN & SDA
			30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Ops atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		0	3	3	100,00		6		UMUM
			31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala		0	8	8	100,00		16		UMUM
			32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala		0	8	8	100,00		16		UMUM
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

			33	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan		0	3636	3.636	100		7272		UMUM
			34	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang dibayarkan		0	3	3	100		6		UMUM
			35	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dibayarkan		0	12	12	100		24		UMUM
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Jumlah administrasi umum PD									
			36	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang diterima setiap sub bagian		0	7	7	100		14		ORGANISASI
			37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah PTT yang dibayarkan gaji dan tunjangannya		0	1	1	100		2		ORGANISASI
				Penataan Organisasi	Persentase Jumlah Organisasi yang ditata									
			38	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah OPD yang mengikuti Bimtek penyusunan SOP dan Peta Proses Bisnis		0	43	43	100		86		ORGANISASI
					Jumlah OPD yang didampingi Penilaian Pelayanan Publik		0	6	6	100		12		
					Jumlah PERBUB yang disusun		0	4	4	100		8		
					Jumlah OPD yang didampingi daslam menyusun Dokumen SAKIP		0	45	45	100		90		
			39	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah ASN yang melaporkan LHKPN		0	61	61	100		122		ORGANISASI
					Jumlah OPD yang dimonitoring dibina dan dievaluasi		0	53	53	100		108		
					Jumlah ASN yang dilakukan pembinaan Disiplin		0	15	15	100		30		
					Jumlah OPD yang didampingi dalam pengisian LKE PMPRB		0	10	10	100		20		
				Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase Jumlah Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah									
			40	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Jenis Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan		0	18	18	100		36		UMUM
			41	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Jenis Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan		0	15	15	100		30		UMUM

			42	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Daerah		0	12	12	100		24		UMUM
			II.	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Koordinasi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah yang dilaksanakan									
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Jumlah Koordinasi dan Kebijakan Pembangunan di bidang Perekonomian Daerah									
			1	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan BBM/LPG, RASDA, Inflasi dan Monev yang dikendalikan dan didistribusikan		0	1	1	100		2		PEREKONOMIAN & SDA
			2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah BUMD dan BLUD yang diawasi dan dibina		0	3	3	100		6		PEREKONOMIAN & SDA
				Pemantauan Kebijakan Terkait Sumber Daya Alam	Jumlah Kebijakan di bidang Sumberdaya									
			3	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah wilayah Kecamatan yang dimonitoring dan dievaluasi di bidang SDA		0	1	1	100		2		PEREKONOMIAN & SDA
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Kegiatan Administrasi Pembangunan yang dilaksanakan									
			4	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah verifikasi dan validasi serta koordinasi penyusunan program pembangunan		0	8	7	87,50		15		AD.PEMB
			5	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah wilayah Kecamatan yang dimonitoring, dibina dan dievaluasi		0	6	6	100,00		12		AD.PEMB
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Jumlah Pengelolaan Barang dan Jasa									
			6	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Bandwidth Internet Telkom Astinet Dedicated dan Internet WIFI.ID yang tersedia dan Perangkat LPSE yang terbaharui		0	10	8	80,00		18		BPBJ
			7	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas PBJ dan Jumlah ASN yang memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan Resiko		0	14	14	100,00		28		BPBJ

			III.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos yang ditindaklanjuti								
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Jumlah Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								
			1	Fasilitas Pengelolaan bina mental Spritual	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spritual yang dilaksanakan		0	40	59	147,50		99	KESRA
			2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penerima Bantuan Sosial Terkait Kesejahteraan Sosial		0	500	445	89,00		945	KESRA
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Hukum								
			3	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang ditetapkan dan Jumlah Penyuluhan Hukum yang dilakukan sesuai kebutuhan daerah		0	12	12	100,00		24	HUKUM
			4	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penanganan perkara hukum Pemda dan jumlah pelaksanaan bantuan hukum terhadap masyarakat tidak mampu serta Jumlah kelompok Desa sadar hukum yang dibina dalam Pelaksanaan Aksi Ham		0	2	2	100,00		4	HUKUM
			5	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah pengelolaan, pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta Jumlah penyebaran informasi produk hukum daerah melalui website		0	22	22	100,00		44	HUKUM
				Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Jumlah Administrasi Tata Pemerintahan								
			6	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan		0	25	25	100,00		50	BAPERKEU
			7	Administrasi Pemerintahan Umum	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		0	2	2	100,00		4	TAPEM
					Penataan Administrasi Pemerintahan		0	1	1	100,00		2	TAPEM
			8	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah ATK yang diterima setiap sub bagian		0	18	18	100,00		38	KESRA
			9	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan yang di Fasilitasi		0	25	5	20,00		30	KESRA
			10	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Alat Tulis Kantor yang diterima setiap Sub Bagian		0	20	15	75,00		35	BPBJ

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai target indikator sasaran dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan serta untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan.

Adapun Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau adalah sesuai Tabel T-C.2.2 berikut ini :

Tabel. T-C. 2.2
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai SAKIP	-	-	64,20	67,10	69,15	60,02	64,20	69,15	Jumlah Dokumen SAKIP sesuai Pedoman
2	Nilai LPPD	-	-	2,930	2,950	2,960	-	2,930	2,960	Penilaian Tim
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	81	85	88	80,71	81	88	Nilai IKM
4	Persentase Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Koordinasi Kebijakan yang Dilaksanakan/Jumlah kebijakan Pembangunan Ekonomi
5	Persentase Pengajuab Proposal Hibah/Bansos yang ditindak lanjuti	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Jumlah Proposal Usulan yang ditindaklanjuti/ Jumlah Proposal Masuk

Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau sebagai *fasilitator* dan *advisor* dalam rangka “*Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dengan memantapkan perumusan kebijakan menuju Kabupaten Malinau yang mandiri, damai dan sejaterah didukung pemerintahan yang profesional*”, berupaya melaksanakan tugas dan fungsi membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Badan Fungsi Penunjang Lainnya dan Kecamatan.

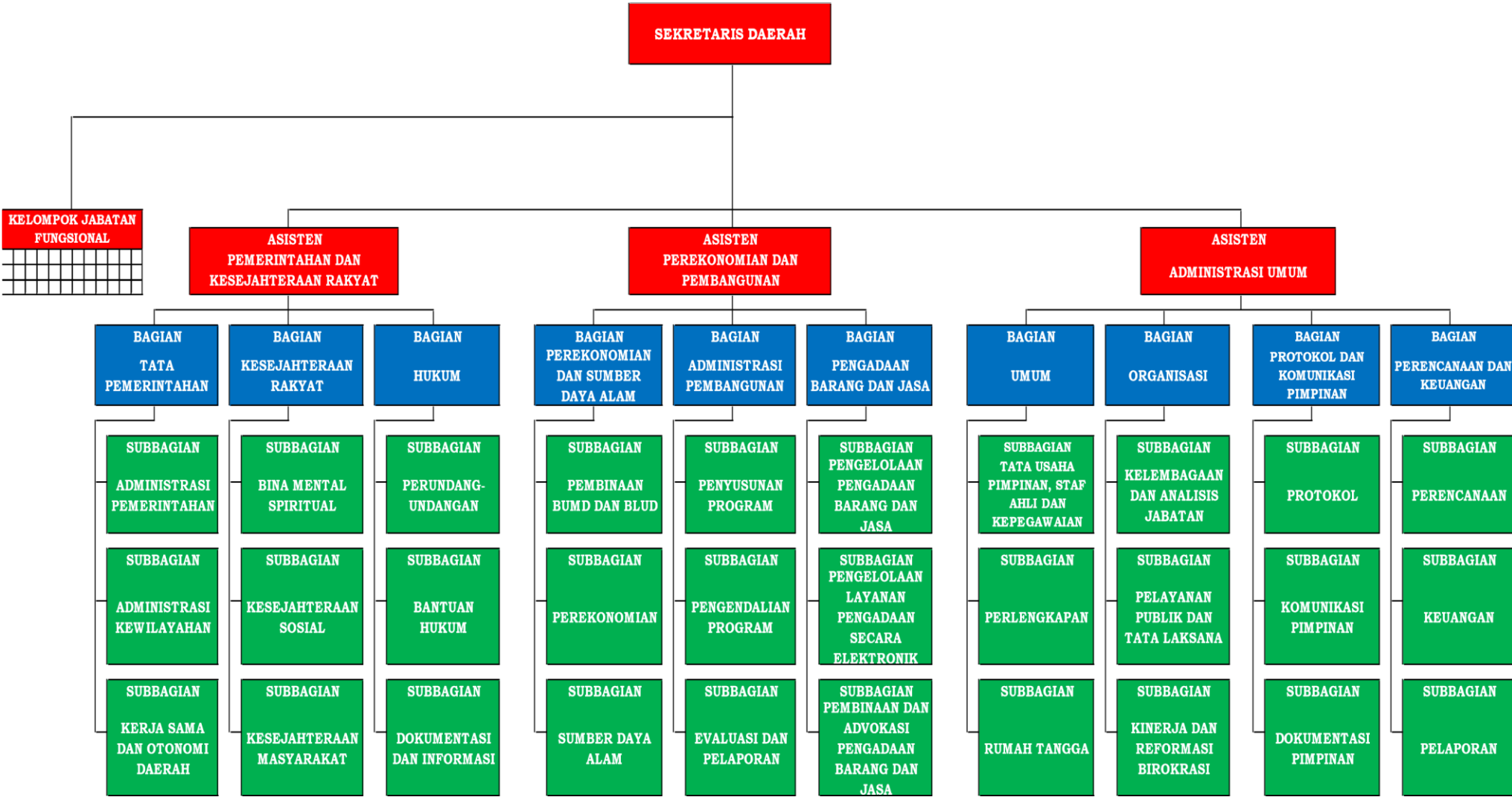
Sesuai Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau maka Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri atas:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi 3 (tiga) bagian :
 1. Bagian Hukum terdiri dari:
 - a) Subbagian Perundang-Undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum;
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi.
 2. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari:
 - a) Subbagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Subbagian Administrasi Kewilayahan;
 - c) Subbagian Kerjasama dan Otonomi Daerah.
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:
 - a) Subbagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial;
 - c) Subbagian Kesejahteraan Masyarakat.
- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi 3 (tiga) bagian :
 1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari:
 - a) Subbagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Subbagian Perekonomian;
 - c) Subbagian Sumber Daya Alam.
 2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari:
 - a) Subbagian Penyusunan Program;
 - b) Subbagian Pengendalian Program;
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari:
 - a) Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - c) Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- d. Asisten Administrasi Umum, membawahi 4 (empat) bagian yaitu ;
 1. Bagian Umum terdiri dari:
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Perlengkapan;
 - c) Subbagian Rumah Tangga.
 2. Bagian Organisasi terdiri dari:
 - a) Subbagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
 - b) Subbagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - c) Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri dari:
 - a) Subbagian Protokol;
 - b) Subbagian Komunikasi Pimpinan;
 - c) Subbagian Dokumentasi Pimpinan.
 4. Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari:
 - a) Subbagian Perencanaan;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Pimpinan Pelaporan.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambaran Stuktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau dapat dilihat pada Gambar. 2.2.1 dibawah ini :

Gambar 2.2.1 STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU



Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

A. **Sekretaris Daerah** mempunyai tugas dan kewajiban dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Badan Fungsi Penunjang Lainnya dan Kecamatan Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Pemerintahan daerah;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas daerah, Badan Daerah, Badan Fungsi Penunjang Lainnya dan Kecamatan;
- Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan Daerah;
- Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Inspektorat, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Badan Fungsi Penunjang Lainnya dan Kecamatan; dan
- Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Wakil Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. **Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat** mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan Daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, dan Hukum. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :

- penyusunan kebijakan Daerah di bidang Tata Pemerintahan, Hukum dan Kerjasama;
- pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat;
- pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Tata Pemerintahan, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama;

- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Tata Pemerintahan, Hukum dan Kerjasama;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang Tata Pemerintahan, Hukum, Kesejahteraan Rakyat dan Kerjasama yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian-bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai berikut :

B.1. **Bagian Hukum** dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi.

Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

B.2. **Bagian Tata Pemerintahan** dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan

Daerah, pelaksanaan pembinaan administrasi di Bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan, dan kerja sama dan otonomi Daerah. Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan, dan Kerja sama dan otonomi Daerah;
- penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan, dan Kerja sama dan otonomi Daerah;
- penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan, dan Kerja sama dan otonomi Daerah;
- penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan, dan Kerja sama dan otonomi Daerah; dan
- penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang Administrasi Pemerintahan, Administrasi Kewilayahan, dan Kerja sama dan otonomi Daerah;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

B.3. **Bagian Kesejahteraan Rakyat** dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
- penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat;
- penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak

diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

C. **Asisten Perekonomian dan Pembangunan** mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan, dan pengadaan barang dan jasa.. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan Sumber Daya Alam;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan Pengadaan Barang dan Jasa dan Sumber Daya Alam;
- pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program SKPD sesuai dengan pembedaan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
- penyusunan kebijakan Daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
- pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Administrasi Pembangunan; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Administrasi Pembangunan, dan Pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.

C.1. **Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam** dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian

pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan Sumber Daya Alam.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian, dan Sumber Daya Alam;
- penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian, dan Sumber Daya Alam;
- penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, Perekonomian, dan Sumber Daya Alam; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

C.2. **Bagian Administrasi Pembangunan** dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi dan Pelaporan.

Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi dan Pelaporan;
- penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi dan Pelaporan;
- penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan,

dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi dan Pelaporan; dan

- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

C.3. **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa** dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis pembinaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa;

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:

- menyiapkan perumusan kebijakan pembinaan pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang dan jasa;
- menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pelaksanaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

- D. **Asisten Administrasi Umum** mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan Kebijakan Daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan, dan perencanaan dan keuangan.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi :

- Penyusunan kebijakan Daerah di bidang organisasi;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Perencanaan dan Keuangan;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Organisasi;
- Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Umum, Organisasi, Protokol dan Komunikasi Pimpinan, dan Perencanaan dan Keuangan;
- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Organisasi;
- Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada Instansi Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang Organisasi, Umum, dan Administrasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian-bagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum adalah sebagai berikut :

- D.1. **Bagian Umum** dipimpin oleh Kepala Bagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;

- Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

D.2. **Bagian Organisasi** dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang kelembagaan dan analisis Jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, dan kinerja dan reformasi birokrasi.

Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Pelayanan Publik dan Tata Laksana serta Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

D.3. **Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan** dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

Daerah di bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi;
- Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi;
- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait Protokol, Komunikasi Pimpinan, dan Dokumentasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

D.4. **Bagian Perencanaan dan Keuangan** dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Daerah di bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

E. **Kelompok Jabatan Fungsional** dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing masing unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan atau bidang keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan unsur-unsur organisasi lainnya yang terkait serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris daerah. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional tersebut dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga Fungsional dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang spesialisasi keahlian dan keterampiannya masing-masing. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang kompeten dan ditunjuk diantara tenaga fungsional.

Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan kebutuhan. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur dan dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja baik program maupun kegiatan yang diemban oleh masing-masing Bagian dapat dilihat pada tingkat capaian realisasi target RENSTRA 2021-2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau.

Tabel 2.2.1
Target Kinerja Capaian Program Renstra Dan Estimasi Realisasi Capaian Target Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 Dan 2024

Nama Bagian	Target Kinerja Capaian Program Renstra 2021-2026 (Rp)	Estimasi Realisasi Capaian Target (Rp)		Estimasi Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra	
		S/D 2023	S/D 2024	S/D 2023	S/D 2024
Administrasi Pembangunan	4.505.507.675	565.309.000	700.000.000	12,55	15,54
Perekonomian dan SDA	4.400.000.000	5.700.000.000	25.800.000.000	129,55	586,36
Protokol dan Komunikasi Pimpinan	7.300.000.000	1.350.045.000	1.400.000.000	18,49	19,18
Pengadaan Barang dan Jasa	4.600.000.000	793.243.200	900.000.000	17,24	19,57
Umum	94.008.513.857	14.370.048.947	109.248.829.178	15,29	116,21
Hukum	4.170.022.850	565.000.000	700.000.000	13,55	16,79
Kesejahteraan rakyat	123.625.551.840	23.841.225.460	27.700.000.000	19,29	22,41
Organisasi	6.300.000.000	1.070.000.000	1.200.000.000	16,98	19,05
Tata Pemerintahan	3.939.367.000	650.000.000	1.000.000.000	16,50	25,38
Perencanaan dan Keuangan	116.189.572.350	23.839.409.270	48.375.761.771	20,52	41,64
	369.038.535.572	72.744.280.877	217.024.590.949		

Tahun 2023 merupakan tahun kedua baik RPJMD Kabupaten Malinau maupun RENSTRA Sekretariat Daerah, dimana diharapkan antara target yang sudah direncanakan dapat dicapai pada Tahun 2026. Dari tabel 2.2.1 diatas, masih banyak unit organisasi pada Sekretariat Daerah pada Tahun 2022 yang apabila diestimasi tingkat capaian realisasi target RENSTRA nya dibawah 20%.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi, masih dijumpai adanya beberapa isu-isu kerja yang menjadi hambatan dan tantangan, yaitu :

1. Belum optimalnya tingkat kepatuhan terhadap Pedoman Penyaluran Hibah dan Bansos
2. Belum optimalnya koordinasi kebijakan pembangunan ekonomi
3. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
4. Belum optimalnya pelayanan publik pemerintah daerah

1. Belum optimalnya perencanaan kegiatan dan anggaran kas sehingga kegiatan baru dapat diselesaikan pada akhir tahun atau pada anggaran perubahan;
2. Belum optimalnya kesadaran dan responsif Perangkat Daerah dalam mengisi suplemen LPPD;
3. Belum optimalnya Proses penginputan kegiatan ke SIRUP oleh PPK sering terlambat dan terbatasnya pemahaman PPK dan PPTK terhadap tahapan lelang/tender kegiatan;
4. Rendahnya kesadaran Perangkat Daerah yang kurang disiplin dalam penyampaian laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Belanja Langsung dan maupun tidak langsung
5. Dokumen Perencanaan baik RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA, RKT, IKU, dan Perjanjian Kinerja OPD belum selaras/Sinkron.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD

Pencapaian Program/Kegiatan terhadap rancangan Akhir RKPD sudah sesuai dengan Hasil Analisis Kebutuhan Tahun Berjalan.

Secara garis besar, unit organisasi di Sekretariat Daerah yang mempunyai porsi pagu anggaran paling besar berada di Bagian Umum, dimana Bagian Umum menyerap sekitar 50,34% dari total pagu Sekretariat Daerah.

Tabel 2.2.2

Rencana Pagu Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024

Nama Bagian	Pagu Anggaran (Rp)	%
Administrasi Pembangunan	700.000.000	0,32
Perekonomian dan SDA	25.800.000.000	11,89
Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.400.000.000	0,65
Pengadaan Barang dan Jasa	900.000.000	0,41
Umum	109.248.829.178	50,34
Hukum	700.000.000	0,32
Kesejahteraan rakyat	27.700.000.000	12,76
Organisasi	1.200.000.000	0,55
Tata Pemerintahan	1.000.000.000	0,46
Perencanaan dan Keuangan	48.375.761.771	22,29
Jumlah	217.024.590.949	100,00

Dari Pagu Anggaran tersebut, Bagian-Bagian di Sekretariat Daerah melakukan analisa kebutuhan baik Program maupun Kegiatan yang diperkirakan dilaksanakan pada Tahun 2024 yang akan datang. Analisa tersebut tertuang dalam “Hasil Analisis Kebutuhan”. Secara rinci hasil analisis kebutuhan, dapat dilihat pada *review* terhadap Rancangan Akhir RENJA Tahun 2024 di Tabel T-C. 31.

Tabel. T-C. 31
Review Terhadap Rancangan Akhi Renja Tahun 2024

OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau

No.	Rancangan Akhir RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT												
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental Spiritual	70 Dokumen	17.197.857.822	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental Spiritual	70 Dokumen	17.649.987.600		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial	500 Dokumen	4.902.245.092	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Malinau	Jumlah Dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial	500 Dokumen	7.391.132.400		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Malinau	Jumlah dokumen hasil kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahrreraan masyarakat	30 Dokumen	2.541.122.546	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Malinau	Jumlah dokumen hasil kebijakan evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahrreraan masyarakat	30 Dokumen	2.658.880.000		
					24.641.225.460						27.700.000.000	
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN												
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	99.984.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	99.984.000		
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan						
	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	2 laporan	140.000.000	Fasilitasi Keprotokolan		Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	2 laporan	190.046.000		
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	1 laporan	99.960.000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan		Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	1 laporan	99.960.000		

	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	2 laporan	1.010.000.000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	2 laporan	1.010.010.000	
				1.349.954.000				1.400.000.000	
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	165 orang/bulan	22.472.606.470	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	165 orang/bulan	46.420.255.615	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 Dokumen	100.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran SKPD	18 laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran SKPD	20 laporan	100.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	1 paket	323.102.800	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	1 paket	323.102.800	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	18 laporan	430.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	18 laporan	430.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	30.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	30.000.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	200.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	4 dokumen	200.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 dokumen	50.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD dan ikhtisar laporan realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	100.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD dan ikhtisar laporan realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 laporan	100.000.000	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	-	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	2 Orang/Bulan	622.403.356	

				23.839.409.270					48.375.761.771		
BAGIAN UMUM											
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	200.994.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	200.992.000			
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1564 paket	1.486.335.346	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	1564 paket	1.485.335.346			
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	199.754.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	1 paket	199.754.000			
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	18 paket	200.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan dan material yang disediakan	18 jenis	200.000.000			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 laporan	99.358.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	15 kali	1.502.225.915			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan peroragan dinas atau kendaraan dinas yang disediakan	2 unit	613.995.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan peroragan dinas atau kendaraan dinas yang disediakan	2 unit	613.995.000			
	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 paket	199.930.300	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 unit	199.930.300			
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	9 unit	652.007.312	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	12 unit	629.763.132			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	4.876.760.004	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	4.876.760.004			
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	382.581.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	12 laporan	382.581.000			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	2.142.418.968	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	94.988.380.231			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	70 unit	361.096.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	70 unit	361.096.000			

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan parasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6 unit	211.797.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan parasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	6 unit	211.797.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	7 unit	1.638.461.250	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	7 unit	1.638.461.250	
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12 paket	1.311.115.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	12 paket	1.311.115.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	12 paket	191.010.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	12 paket	191.010.000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	5 paket	255.633.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	5 paket	255.633.000	
				15.000.000.000				109.248.829.178	
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA									
1	Program Perekonomian dan Pembangunan				Program Perekonomian dan Pembangunan				
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	2 dokumen	100.000.000	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	3 laporan	400.000.000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	3 laporan	20.520.000.000	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	1 dokumen	80.000.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	1 dokumen	80.000.000	
	Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam				Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam				
	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan, dan perikanan	1 dokumen	100.000.000	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, kehutanan, kelautan, dan perikanan	1 dokumen	5.100.000.000	
				680.000.000				25.800.000.000	

BAGIAN ORGANISASI										
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	30.000.000	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 laporan	30.000.000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	24.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 laporan	24.000.000		
	Penataan Organisasi				Penataan Organisasi					
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	3 dokumen	350.000.000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	3 dokumen	350.000.000		
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan public dan tata laksana	2 laporan	125.000.000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan public dan tata laksana	2 laporan	125.000.000		
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	5 dokumen	121.000.000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	5 dokumen	121.000.000		
	Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan public dan tata laksana	3 dokumen	30.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan public dan tata laksana	3 dokumen	300.000.000		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	3 dokumen	250.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	3 dokumen	250.000.000		
				930.000.000					1.200.000.000	
BAGIAN HUKUM										
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan peralatan dan perelngkpan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	17.000.000	Penyediaan peralatan dan pereelngkpan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	17.000.000		
	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	10 Paket	25.000.000	Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	10 Paket	25.000.000		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	20.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 paket	20.000.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Peneyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10 Laporan	70.000.0000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Peneyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	70.000.0000		

	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hokum daerah yang ditetapkan	3 dokumen	173.000.000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hokum daerah yang ditetapkan	3 dokumen	173.000.000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Penanganan perkara Hukum Pemda dan Jumlah bantuan Hukum serta pelaksanaan Ranham dan Kabupaten Kota Peduli Ham	1 kasus	180.000.000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Penanganan perkara Hukum Pemda dan Jumlah bantuan Hukum serta pelaksanaan Ranham dan Kabupaten Kota Peduli Ham	1 kasus	200.000.000	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah penyebaran informasi produk hokum melalui website dan pelaksanaan penyuluhan hukum	3 dokumen	185.000.000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah penyebaran informasi produk hokum melalui website dan pelaksanaan penyuluhan hukum	3 dokumen	195.000.000	
				670.000.000					700.000.000
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah paket barang bahan logistic kantor yang disediakan	1 paket	6.000.000	Penyediaan Brang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang bahan logistic kantor yang disediakan	1 paket	8.249.807	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	7.200.000	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	7.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah								
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinanya	4 unit	20.070.000	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Peijinnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4 unit	20.070.000	
2	Program Perekonomian dan Pembangunan				Program Perekonomian dan Pembangunan				
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	12 dokumen	110.000.000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	12 dokumen	172.353.000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	12 dokumen	135.973.200	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	12 dokumen	310.205.553	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	14 orang	520.000.000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	14 orang	381.921.640	
				799.243.200					900.000.000

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8000 dokumen	9.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 paket	58.500.000	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	12 paket	8.600.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor	15 paket	12.600.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8000 dokumen	9.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	8000 dokumen	9.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	116.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8 Laporan	131.800.000	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD dan ikhtisar laporan realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	72 Buku	56.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD dan ikhtisar laporan realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	72 Buku	56.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	1 unit	17.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	1 unit	17.600.000	
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 unit	54.000.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	1 unit	54.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian.verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penata usahaan dan pengujian/ verifikasi SKPD	47 OPD	53.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian.verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penata usahaan dan pengujian/ verifikasi SKPD	47 OPD	53.000.000	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	100 Buku	71.000.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	120 Buku	81.000.000	
2	Program Perekonomian dan Pembangunan				Program Perekonomian dan Pembangunan				
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	54 dokumen	95.000.000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	60 dokumen	100.000.000	

	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	15 laporan	142.000.000	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	15 laporan	142.000.000	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	2 laporan	60.000.000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	2 laporan	38.000.000	
				657.700.000				700.000.000	
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN									
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat				
	Adminstrasi Tata Pemerintahan				Adminstrasi Tata Pemerintahan				
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi Pemerintahan	1 dokumen	150.000.000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi Pemerintahan	1 dokumen	150.000.000	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pemerintahan	4 dokumen	100.000.000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pemerintahan	1 dokumen	300.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	2 dokumen	400.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	2 dokumen	550.000.000	
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistic kantor	10 paket	75.000.000	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistic kantor	-	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	25.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	0	
				750.000.000				1.000.000.000	
TOTAL				69.283.831.930				217.024.590.949	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Musrenbang, POKIR dll)

Program/Kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara Usulan Masyarakat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat Desa sampai Musrenbang tingkat Kabupaten. Hasil usulan Musrenbang tersebut digunakan sebagai bahan untuk menyusun Rancangan Akhir RENJA dibahas dalam Forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan Rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyesuaian program dan kegiatan serta penajaman Indikator dan Target Kinerja Program dan Kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran Pembangunan Daerah sesuai tupoksi Perangkat Daerah. Adapun fungsi Bagian-Bagian adalah sebagai pelaksana kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan permintaan teknis.

Tabel T- C. 32
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Musrenbang, POKIR dll);

No	Program/Kegiatan (Sesuai Nomenklatur Usulan Musrenbang/Pokir)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan/Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA					
	<u>USULAN MUSRENBANG</u>				
1	Bank Kas BPD	Kec. Mentarang Hulu / Desa Long Berang		1 paket	Tidak dapat diakomodir/dilaksanakan karena tidak sesuai dgn Nomenklatur Kegiatan Bag. Perekonomian dan SDA & Permendagri No.90 Tahun 2019 (Program Perekonomian dan Pembangunan)
2	Pengadaan SOA Sembako	Kec. Bahau Hulu / 6 Desa		1 Tahun	Akan terakomodir : SOA Penumpang dan Barang, SOA Barang melewati sungai dan saat ini kegiatan SOA dalam tahap administrasi (persiapan dokumen lelang)
3	Peningkatan Subsidi Penerbangan Bahau Hulu	Kec. Bahau Hulu		2 kali / Minggu	Dalam proses persiapan lelang
4	Pengadaan SPBU Kompak	Kec. Bahau Hulu		1 Paket	Saat ini dalam tahap persiapan dokumen perusahaan untuk pengurusan SPBU 1 Harga
5	Pembangunan KCP BPD BANKALTIM-TARA	Kec. Bahau Hulu / Long Alango		1 Paket	Tidak dapat diakomodir/dilaksanakan karena tidak sesuai dgn Nomenklatur Kegiatan Bag. Perekonomian dan SDA & Permendagri No.90 Tahun 2019 (Program Perekonomian dan Pembangunan)
6	Penerbangan Subsidi Tanjung Selor-Mahak Baru	Kec. Sungai Boh / Mahak Baru		2 kali / Minggu	Kegiatan SOA akan dilaksanakan dari Malinau- Mahak Baru (saat ini dalam proses administrasi/persiapan lelang)
7	Subsidi Sembako	Long Lembusan Kec. Sungai Boh		1 Paket	SOA Penumpang Udara yang terakomodir
8	Penerbangan Subsidi dari Mahak Baru - Malinau (PP)	Desa Dumu Mahak Kec. Sungai Boh		2 kali / Minggu	Kegiatan SOA akan dilaksanakan dari Malinau- Mahak Baru (saat ini dalam proses administrasi/persiapan lelang)
9	Penerbangan Subsidi dari Mahak Baru - Tanjung Selor (PP)	Desa Dumu Mahak Kec. Sungai Boh		2 kali / Minggu	Kegiatan SOA akan dilaksanakan dari Malinau- Mahak Baru (saat ini dalam proses administrasi/persiapan lelang)
10	Penerbangan Subsidi Samarinda - Sungai Boh PP	Kec. Sungai Boh		2 kali / Minggu	Tidak dapat diakomodir/dilaksanakan
11	Penerbangan Subsidi Malinau - Mahak Baru	Desa Agung Baru Kec. Sungai Boh		2 kali / Minggu	Kegiatan SOA akan dilaksanakan dari Malinau- Mahak Baru (saat ini dalam proses administrasi/persiapan lelang)

No	Program/Kegiatan (Sesuai Nomenklatur Usulan Musrenbang/Pokir)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan/Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12	Penerbangan Subsidi Tanjung Selor-Mahak Baru	Desa Agung Baru Kec. Sungai Boh		1 kali / Minggu	Tidak dapat diakomodir/dilaksanakan
13	BBM Satu Harga	Desa Long Sule dan Long Pipa Kec. Kayan Hilir		1 paket	Tidak dapat diakomodir/dilaksanakan karena SPBU 1 Harga hanya di Kecamatan Kayan Hilir
14	Pengadaan Subsidi Penerbangan	5 Desa di Kec. Kayan Hilir		1 paket	Kegiatan SOA akan dilaksanakan dan saat ini dalam proses administrasi/persiapan lelang
15	Pengembangan Kebun Kopi, Lada, Kakau, Nanas, Tebu	5 Desa di Kec. Kayan Hilir		1 Paket	Ke Dinas Pertanian
16	Peningkatan Subsidi Sembako	Desa Sule - Pipa Kec. Kayan Hilir		1 Tahun	Tidak dapat diakomodir/dilaksanakan karena
17	Pengadaan Subsidi Penerbangan	Desa Sule - Pipa Kec. Kayan Hilir		2 kali / Minggu	Tidak dapat diakomodir/dilaksanakan
18	Peningkatan Subsidi BBM	Desa Sule - Pipa Kec. Kayan Hilir		1 Tahun	Tidak dapat diakomodir/dilaksanakan karena saat ini moratorium sub penyalur
19	Pengadaan Subsidi Sembako	Desa Data Dian Kec. Kayan Hilir		1 paket	Tidak dapat diakomodir/dilaksanakan
20	Penambahan Subsidi Sembako	Desa Long Metun Kec. Kayan Hilir		1 paket	Tidak dapat diakomodir/dilaksanakan
21	Pengadaan Subsidi Sembako	Desa Sule Kec. Kayan Hilir		1 paket	Tidak dapat diakomodir/dilaksanakan
22	Pengadaan Subsidi Penumpang	Desa Sule Kec. Kayan Hilir		1 paket	Kegiatan SOA akan dilaksanakan dan saat ini dalam proses administrasi/persiapan lelang
23	Subsidi Penumpang dan Barang	Desa Pipa Kec. Kayan Hilir		1 Paket	Tidak dapat diakomodir/dilaksanakan
	<u>POKIR</u>				
1	Perlu adanya pembangunan bank daerah dan fasilitas perbankan yang tersedia bagi masyarakat	Desa Long Pujungan, Kecamatan Pujungan		1 Paket	Tidak dapat diakomodir/dilaksanakan karena tidak sesuai dgn Nomenklatur Kegiatan Bag. Perekonomian dan SDA & Permendagri No.90 Tahun 2019 (Program Perekonomian dan Pembangunan)
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN					
	<u>USULAN MUSRENBANG</u>				
1	Pemetaan Batas Wilayah Adat Desa	Long Sule		1 Paket	Untuk Program Administrasi Pemerintahan Desa sekarang pindah ke DPMD
2	Pemetaan Batas wilayah adat Desa	Long Sule		1 Paket	Untuk Program Administrasi Pemerintahan Desa sekarang pindah ke DPMD

No	Program/Kegiatan (Sesuai Nomenklatur Usulan Musrenbang/Pokir)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan/Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Peresmian Kantor Camat Sungai Tubu	Kecamatan		1 Kegiatan	Akan di Tampung
4	Peresmian Kantor Camat Sungai Tubu	Long Nyau		1 Kegiatan	Akan di Tampung
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					
	<u>POKIR</u>				Diusul 2024 belum ada Proposal
1	Pembangunan Gereja	Desa Lung Gafid Kec. Mentarang Hulu		20x12 M ²	Diusul 2024 belum ada Proposal
2	Pembangunan Gedung Gereja Dari Beton	Desa Rian Tubu		1 Unit	Diusul 2024 belum ada Proposal
3	Pembangunan Rumah Dinas Gembala	Harapan Baru Desa Long Liku		1 Unit	Diusul 2024 belum ada Proposal
	Rehap Gedung Gereja GKPI	Desa Mentarang Baru		1 Unit	Rp.202.450.000/ GKII Bukit Hermon
	Pembangunan Rumah Pastori GKII	Desa Mentraang Baru		1 Unit	Diusul 2024 belum ada Proposal
	Pembangunan Siring Gereja	Desa Long Simau		1 Unit	Rp. 1.500.000.000/ GKPI Malinau Kota
	Hibah Pembangunan Gereja GKPI Malinau Kota	Desa Malinau Kota, Kabupaten Malinau		1 Paket	Diusul 2024 belum ada Proposal
	Rehab Gereja GKPI Desa Rian Tubu	Desa Rian Tubu, Kec. Sungai Tubu		1 Paket	Diusul 2024 belum ada Proposal
	Siring Dan Penimbunan Halaman Belakang Gereja GKPI Lubak Manis	Desa Lubuk Manis, Kecamatan Malinau Utara		1 Paket	Diusul 2024 belum ada Proposal
	Hibah Pembangunan Rehab Altar Dan Menara Gereja GKII Semenggaris	Desa Semenggaris, Malinau Utara		1 Paket	Diusul 2024 belum ada Proposal
	Pemasangan Siring Keliling Gereja GKII Harapan Baru, Kecamatan Mentarang	Gereja GKII Harapan Baru, Kecamatan Mentarang		1 Paket	Tersedia Tahun 2023
	Beasiswa Bagi Pemuda, Pelajar, Mahasiswa Yang Kurang Mampu Dan Yang Berprestasi Terutama Di Desa : Paking Rian Tubu, Long Berang Long Fala	15 Kecamatan Di Kab. Malinau Dengan Prioritas Di Kecamatan Perbatasan/ Pedalaman		1 Paket	Diusul 2024 belum ada Proposal
	Siring Keliling Gereja GKII Singai Terang	Desa Desa Long Gafid, Desa Long Bisai		1 Paket	Diusul 2024 belum ada Proposal

No	Program/Kegiatan (Sesuai Nomenklatur Usulan Musrenbang/Pokir)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan/Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Hibah Organisasi Kemasyarakatan/Keagamaan/Adat Di Kabupaten Malinau Untuk Mendukung Program Penanaman Karakter Dan Nilai Moral Keagamaan	15 Kecamatan Di Kabupaten Malinau		1 Paket	Diusul 2024 belum ada Proposal
	Siring Gereja GKII Pelita Kanan Sepanjang 600 M	Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota		1 Paket	Diusul 2024 belum ada Proposal
	Siring Batas GKPI Dan Gereja Bethany	Desa Pelita Kanaan, Kecamatan Malinau Kota		1 Paket	Diusul 2024 belum ada Proposal
	Pembangunan Gedung Rumah Ibadah GPIB Nawang Baru	Kec. Kayan Hulu Desa Nawang Baru		1 Paket	Rp. 1.000.000.000,-/ GPIB Imanuel Nawang Baru
	Pembangunan Gedung Rumah Ibadah GPIB Long Nawang	Kec. Kayan Hulu Desa Long Nawang		1 Paket	Diusul 2024 belum ada Proposal
	Rehab Bangunan Gereja GKII Metun	Kec. Kayan Hilir Desa Metun		1 Paket	Diusul 2024 belum ada Proposal
	Pembangunan Gedung Gereja Khatolik Long Ampung	Kec. Kayan Selatan Desa Long Ampung		1 Paket	Diusul 2024 belum ada Proposal
	Pembangunan Gedung Pastori Jemaat GKII Data Baru	Desa Data Baru		1 Paket	Diusul 2024 belum ada Proposal
	Pembangunan Gereja GKPI	Rian Tubu		1 Paket	Diusul 2024 belum ada Proposal
	Hibah Pembanguna Masjid Ainun Jorjah	Rt. 01 Malinau Seberang		1 Paket	Diusul 2024 belum ada Proposal
BAGIAN UMUM					
	<u>POKIR</u>				
1	Perlu rumah persinggahan untuk masyarakat singgah di Tanjung Selor	Desa Pujungan, Kecamatan Pujungan			Diakomodir
2	Pengadaan Mesin Ketinting dan Perahu (13 HP)	Desa Lung Gafid Kecamatan Mentarang Hulu			Dikembalikan ke Desa
	<u>USULAN MUSRENBANG</u>				
	Bidang Pemerintahan (Kecamatan Sungai Tubu)				
1	Sound Sistem dan Mic	Kec. Sungai Tubu		1 set	Diakomodir

No	Program/Kegiatan (Sesuai Nomenklatur Usulan Musrenbang/Pokir)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan/Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	In Focus	Kec. Sungai Tubu		1 set	Diakomodir
3	Motor Dinas ASN	Kec. Sungai Tubu		5 unit	Diakomodir
	Bidang Pemerintahan (Kecamatan Malinau Barat)				
4	Motor Dinas	Long Kenipe		9 unit	Dikembalikan ke Desa
5	Laptop	Long Kenipe		9 unit	Dikembalikan ke Desa
6	Pengadaan Meubelair Kantor Kecamatan Malinau Barat	Kecamatan Malinau Barat		9 set	Diakomodir
7	Pengadaan Komputer dan Printer	Kecamatan Malinau Barat		7 set	Diakomodir
8	Pengadaan LCD / Infocus	Kecamatan Malinau Barat		2 set	Diakomodir
9	Pengadaan AC Kantor Kecamatan Malinau Barat	Kecamatan Malinau Barat		9 unit	Diakomodir
10	Pengadaan Kursi Chitose	Kecamatan Malinau Barat		200 unit	Diakomodir
11	Pengadaan Mesin Foto Copy	Kecamatan Malinau Barat		1 unit	Diakomodir
12	Pengadaan Motor KLX	Kecamatan Malinau Barat		3 unit	Diakomodir
	Bidang Perekonomian (Kecamatan Mentarang Hulu)				
13	Pengadaan Mesin Ketinting	Lg. Semamu		1 paket	Dikembalikan ke Desa
14	Pengadaan Mesin 40 Hp dan Perahu	Lg. Semamu		2 paket	Dikembalikan ke Desa
	Bidang Pembangunan Manusia (Kecamatan Mentarang Hulu)				
15	Pengadaan Komputer Untuk UNBK	Lg. Barang		20 unit	Dinas Pendidikan

No	Program/Kegiatan (Sesuai Nomenklatur Usulan Musrenbang/Pokir)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan/Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Pengadaan Roda 4 Kantor Camat	Lg. Barang		1 unit	Diakomodir
17	Pengadaan Roda 2 Kantor Camat	Lg. Barang		2 unit	Diakomodir
18	Pengadaan kendaraan Ketinting kantor Camat	Lg. Barang		2 unit	Diakomodir
19	Pengadaan Televisi Kantor Camat	Lg. Barang		1 unit	Diakomodir
20	Pengadaan AC Kantor Camat	Lg. Barang		11 unit	Diakomodir
21	Pengadaan Alat Musik Band	Lg. Simau		1 paket	Dikembalikan ke Desa
22	Pengadaan Alat Musik	Lg. Mekatip		1 unit	Dikembalikan ke Desa
	Bidang Pemerintahan (Kecamatan Pujungan)				
23	Pengadaan kendaraan Roda Dua	Desa Lg. Lame		1 unit	Dikembalikan ke Desa
24	Pembangunan Gereja	Desa Lg. Belaka		1 unit	Dikembalikan ke Desa
25	Pengadaan Komputer	Desa Lg. Ketaman		10 unit	Dikembalikan ke Desa
26	Pengadaan Mesin Lampu (Ganset)	Desa Lg. Ketaman		1 unit	Dikembalikan ke Desa
	Bidang Pemerintahan (Kecamatan Bahau Hulu)				
27	Pengadaan Mobil Dinas Diesel 4x4 (Mitsubishi Strada Triton Singel Cabin)	Desa Long Alango		2 unit	Dikembalikan ke Desa
28	Pengadaan Motor Dinas	Desa Long Alango		4 unit	Dikembalikan ke Desa
29	Pengadaan Mesin Ketinting Lembaga Desa	Desa Long Kemuat		1 unit	Dikembalikan ke Desa
30	Pengadaan Kendaraan Roda 4 Singel Cabin 4x4	Desa Apau Ping		1 unit	Dikembalikan ke Desa

No	Program/Kegiatan (Sesuai Nomenklatur Usulan Musrenbang/Pokir)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan/Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	Pengadaan Computer	Kec. Bahau Hulu		8 paket	Diakomodir
32	Pengadaan Printer	Kec. Bahau Hulu		8 unit	Diakomodir
33	Pengadaan Mobil Dinas Kecamatan Bahau Hulu (Double Cabin 4x4)	Kec. Bahau Hulu		1 unit	Diakomodir
34	Pengadaan Mesin Foto Copy	Kec. Bahau Hulu		2 unit	Diakomodir
35	Pengadaan Mesin Ketinting	Kec. Bahau Hulu		2 unit	Diakomodir
36	Pengadaan Laptop	Kec. Bahau Hulu		3 unit	Diakomodir
37	Pengadaan Motor Dinas	Kec. Bahau Hulu		2 unit	Diakomodir
	Bidang Pemerintahan (Kecamatan Kayan Hulu)				
38	Pengadaan Mobil Double Cabin untuk desa Long Betaoh	Desa Long Betaoh		1 unit	Dikembalikan ke Desa
	Bidang Perekonomian (Kecamatan Kayan Hilir)				
39	Pengadaan Mobil Triton DC	Desa Sai Anai		1 unit	Dikembalikan ke Desa
	Bidang Pemerintahan (Kecamatan Kayan Hilir)				
40	Pengadaan Mesin Foto Copy untuk kantor Camat	Desa Data Dian		1 unit	Diakomodir
41	Pengadaan Meubeler dan perabot Mes Kecamatan	Desa Data Dian		1 paket	Diakomodir
42	Pengadaan Motor Dinas	Desa Sai Anai		2 unit	Diakomodir
43	Pengadaan Komputer Kantor	Long Sule		1 paket	Diakomodir
44	Pengadaan ACCU merk YUASA 100 volt 12	Long Sule		1 unit	Diakomodir

No	Program/Kegiatan (Sesuai Nomenklatur Usulan Musrenbang/Pokir)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan/Alasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
45	Pengadaan Laptop kantor	Long Sule		2 unit	Diakomodir
46	Pengadaan Printer Epson L 3110	Long Sule		1 unit	Diakomodir
47	Pengadaan Mesin Genset Yamaha EF 2600FW	Long Sule		1 unit	Diakomodir
48	Pengadaan Mesin Rumput	Long Sule		1 unit	Diakomodir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sesuai dengan Visi Pembangunan Nasional “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Dengan upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 (tujuh) misi pembangunan yaitu :

1. Peningkatana kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan sistem hokum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Agenda Pembangunan Nasional merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai Pemerintah Kabupaten/Kota. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang ditentukan juga harus menjadi Agenda Pembangunan Pemerintah Kabupaten dengan mengintegrasikan ke dalam perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional yang tertuang di rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah – RKPD (RKPD) yang direncanakan.

3.2 Tujuan dan Sasaran RENJA Perangkat Daerah

3.2.1 Tujuan

Adapun Tujuan Renja pada Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

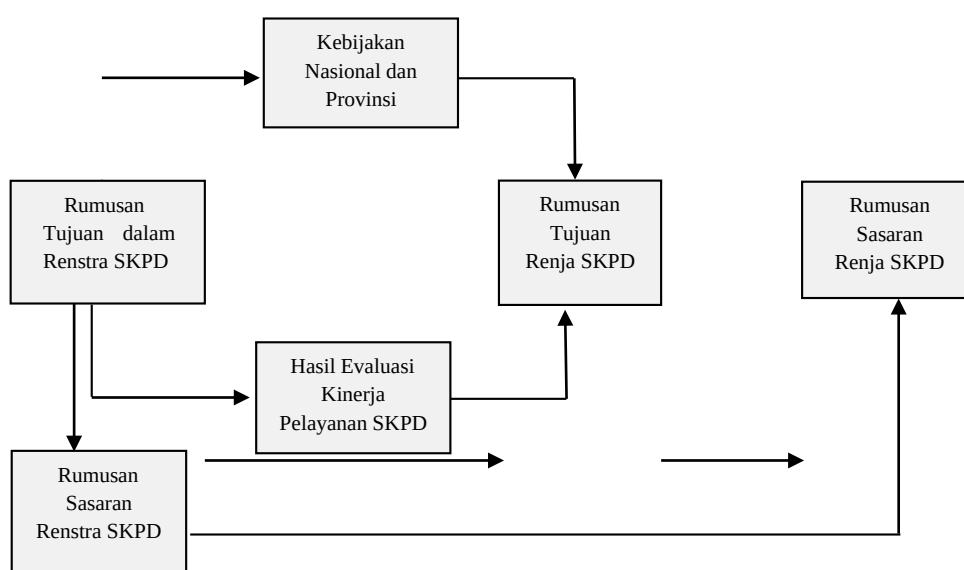
1. Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan transparan.
2. Meningkatnya system tata kelola Pemerintahan yang efektif.
3. Meningkatnya koordinasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
4. Meningkatnya koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

3.2.2 Sasaran

Sasaran Renja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.
2. Meningkatnya kualitas tata laksana dan pelayanan publik Pemerintah Daerah.
3. Meningkatnya koordinasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap pedoman penyaluran hibah dan bansos

Gambar 3.2.1
Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
(Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau)



3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Prioritas)

Program Kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada lampiran Tabel T-C. 33 dapat dilihat rangkaian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Beberapa Bagian di Sekretariat Daerah mempunyai rumusan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau yang mendukung prioritas Kabupaten dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini dapat dilihat pada lampiran tabel T-C. 33 yaitu Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau.

Tabel T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat								
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Kab. Malinau	70 dokumen	17.649.987.600	APBD		70 dokumen	17.649.987.600
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial	Kab. Malinau	500 dokumen	7.391.132.400	APBD		500 dokumen	7.391.132.400
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Kab. Malinau	30 dokumen	2.658.880.000	APBD		30 dokumen	2.658.880.000
					27.700.000.000				27.700.000.000
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Malinau	1 paket	99.984.000	APBD		1 paket	99.984.000
2	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan								
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	Kab. Malinau	2 Laporan	190.046.000	APBD		2 Laporan	190.046.000
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	Kab. Malinau	1 Laporan	99.960.000	APBD		1 Laporan	99.960.000
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	Kab. Malinau	2 laporan	1.010.010.000	APBD		2 laporan	1.010.010.000
					1.400.000.000				1.400.000.000
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Malinau	165 orang/bulan	46.420.255.615	APBD		165 orang/bulan	46.420.255.615

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Malinau	1 dokumen	100.000.000	APBD		1 dokumen	100.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran SKPD	Kab. Malinau	20 laporan	100.000.000	APBD		20 laporan	100.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan dan material yang disediakan	Kab. Malinau	1 paket	323.102.800	APBD		1 paket	323.102.800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Malinau	18 laporan	430.000.000	APBD		18 laporan	430.000.000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Malinau			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malinau	4 dokumen	200.000.000	APBD		4 dokumen	200.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA	Kab. Malinau	2 Dokumen	50.000.000	APBD		2 Dokumen	50.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD dan iktisar laporan realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Malinau	1 laporan	100.000.000	APBD		1 laporan	100.000.000
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kab. Malinau	2 orang/bulan	622.403.356	APBD		2 orang/bulan	622.403.356
					48.375.761.771				48.375.761.771
BAGIAN UMUM									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Malinau	1 paket	200.992.000	APBD		1 paket	200.992.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Kab. Malinau	1564 paket	1.485.335.346	APBD		1564 paket	1.485.335.346
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Malinau	1 paket	199.754.000	APBD		1 paket	199.754.000
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan dan material yang disediakan	Kab. Malinau	18 jenis	200.000.000	APBD		18 jenis	200.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Malinau	15 kali	1.502.225.915	APBD		15 kali	1.502.225.915
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang di adakan							

	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Malinau	6 unit	199.930.300	APBD		6 unit	199.930.300
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Malinau	12 unit	629.763.132	APBD		12 unit	629.763.132
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang di sediakan							
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Malinau	12 laporan	4.876.760.004	APBD		12 laporan	4.876.760.004
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Malinau	12 laporan	382.581.000	APBD		12 laporan	382.581.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Malinau	12 Laporan	94.988.380.231	APBD		12 Laporan	94.988.380.231
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah yang Terpelihara							
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kab. Malinau	70 unit	361.096.000	APBD		70 unit	361.096.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan parsarana gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kab. Malinau	6 unit	211.797.000	APBD		6 unit	211.797.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kab. Malinau	7 Unit	1.638.461.250	APBD		7 Unit	1.638.461.250
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitas Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang di Sediakan							
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	Kab. Malinau	12 paket	1.311.115.000	APBD		12 paket	1.311.115.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	Kab. Malinau	12 paket	191.010.000	APBD		12 paket	191.010.000
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	Kab. Malinau	5 paket	255.633.000	APBD		5 paket	255.633.000
					109.248.829.178				109.248.829.178
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA									
1	Program Perekonomian dan Pembangunan								
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian								
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Malinau	2 dokumen	100.000.000	APBD		2 dokumen	100.000.000
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	Kab. Malinau	3 laporan	20.520.000.000	APBD		3 laporan	20.520.000.000

	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Kab. Malinau	1 dokumen	80.000.000	APBD		1 dokumen	80.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, perdagangan	Kab. Malinau	2 dokumen	5.100.000.000	APBD		2 dokumen	5.100.000.000
					25.800.000.000				25.800.000.000
BAGIAN ORGANISASI									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Malinau	1 laporan	30.000.000	APBD		1 laporan	30.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Malinau	1 laporan	24.000.000	APBD		1 laporan	24.000.000
	Penataan Organisasi								
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Kab. Malinau	3 dokumen	350.000.000	APBD		3 dokumen	350.000.000
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan public dan tata laksana	Kab. Malinau	2 laporan	125.000.000	APBD		2 laporan	125.000.000
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Kab. Malinau	5 dokumen	121.000.000	APBD		5 dokumen	121.000.000
	Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan public dan tata laksana	Kab. Malinau	3 dokumen	300.000.000	APBD		3 dokumen	300.000.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Kab. Malinau	3 dokumen	250.000.000	APBD		3 dokumen	250.000.000
					1.200.000.000				1.200.000.000
BAGIAN HUKUM									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Malinau	2 paket	17.000.000	APBD		2 paket	17.000.000
	Penyediaan Bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Kab. Malinau	10 paket	25.000.000	APBD		10 paket	25.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	Kab. Malinau	4 paket	20.000.000	APBD		4 paket	20.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Malinau	15 laporan	70.000.000	APBD		15 laporan	70.000.000
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum								

	Facilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan	Kab. Malinau	3 dokumen	173.000.000	APBD		3 dokumen	173.000.000
	Facilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penanganan perkara hukum Pemda dan jumlah bantuan hukum serta pelaksanaan Ranham dan Kabupaten Kota Peduli Ham	Kab. Malinau	1 kasus	200.000.000	APBD		1 kasus	200.000.000
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah penyebaran informasi produk hukum melalui website dan pelaksanaan penyuluhan hukum	Kab. Malinau	3 dokumen	195.000.000	APBD		3 dokumen	195.000.000
					700.000.000				700.000.000
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Kab. Malinau	1 paket	8.249.807	APBD		1 paket	8.249.807
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kab. Malinau	1 paket	7.200.000	APBD		1 paket	7.200.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah								
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijanya	Kab. Malinau	4 unit	20.070.000	APBD		4 unit	20.070.000
2	Program Perekonomian dan Pembangunan								
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik								
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Kab. Malinau	12 dokumen	172.353.000	APBD		12 dokumen	172.353.000
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	Kab. Malinau	12 dokumen	310.205.553	APBD		12 dokumen	310.205.553
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Kab. Malinau	14 orang	381.921.640	APBD		14 orang	381.921.640
					900.000.000				900.000.000
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN									
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah								
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Malinau	7 paket	58.500.000	APBD		7 paket	58.500.000
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Kab. Malinau	15 paket	12.600.000	APBD		15 paket	12.600.000

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kab. Malinau	8000 dokumen	9.000.000	APBD		8000 dokumen	9.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malinau	8 Laporan	131.800.000	APBD		8 Laporan	131.800.000
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD dan iktisar laporan realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Malinau	72 Buku	56.500.000	APBD		72 Buku	56.500.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kab. Malinau	1 unit	17.600.000	APBD		1 unit	17.600.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian.verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penata usahaan dan pengujian/ verifikasi SKPD	Kab. Malinau	47 OPD	53.000.000	APBD		47 OPD	53.000.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kab. Malinau	120 Buku	81.000.000	APBD		120 Buku	81.000.000
2	Program Perekonomian dan Pembangunan								
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan								
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	Kab. Malinau	60 dokumen	100.000.000	APBD		60 dokumen	100.000.000
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Kab. Malinau	15 laporan	142.000.000	APBD		15 laporan	142.000.000
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Kab. Malinau	2 laporan	38.000.000	APBD		2 laporan	38.000.000
					700.000.000				700.000.000
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN									
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat								
	Adminstrasi Tata Pemerintahan								
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	Kab. Malinau	1 dokumen	150.000.000	APBD		1 dokumen	150.000.000
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	Kab. Malinau	1 dokumen	300.000.000	APBD		1 dokumen	300.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Kab. Malinau	2 dokumen	550.000.000	APBD		2 dokumen	550.000.000
					1.000.000.000				1.000.000.000
TOTAL					217.024.590.949				217.024.590.949

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhir Rencana Kerja adalah Dokumen Akhir Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan selama periode 1 (satu) tahun.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 050 Tahun 2020, bahwa program disusun dengan memperhatikan Sub bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sedangkan Sub Kegiatan

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau sebagai instrument pelaksana dari Program Tahun 2024 tertuang dalam tabel Tabel 4.1 :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Nama OPD : Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024 (Tahun Rencana)			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						
1	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat					
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pengelolaan bina mental spiritual	Kab. Malinau	70 dokumen	17.197.857.822	APBD
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan sosial yang meliputi urusan sosial	Kab. Malinau	500 dokumen	7.391.132.400	APBD
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	Kab. Malinau	30 dokumen	2.541.122.546	APBD
					27.700.000.000	
BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Malinau	1 paket	99.984.000	APBD
2	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan					
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah laporan hasil fasilitasi keprotokolan	Kab. Malinau	2 Laporan	190.046.000	APBD
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah laporan hasil fasilitasi komunikasi pimpinan	Kab. Malinau	1 Laporan	99.960.000	APBD
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan pendokumentasian tugas pimpinan	Kab. Malinau	2 laporan	1.010.010.000	APBD
					1.400.000.000	
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Malinau	165 orang/bulan	46.420.255.615	APBD

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Malinau	1 dokumen	100.000.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan, triwulan, semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan bulanan, triwulan, semesteran SKPD	Kab. Malinau	20 laporan	100.000.000	APBD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan dan material yang disediakan	Kab. Malinau	1 paket	323.102.800	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Malinau	18 laporan	430.000.000	APBD
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Kab. Malinau
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Malinau	4 dokumen	200.000.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA	Kab. Malinau	2 Dokumen	50.000.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD dan iktisar laporan realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Malinau	1 laporan	100.000.000	APBD
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	Kab. Malinau	2 orang/bulan	622.403.356	APBD
					48.375.761.771	
BAGIAN UMUM						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Malinau	1 paket	200.992.000	APBD
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Kab. Malinau	1564 paket	1.485.335.346	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Malinau	1 paket	199.754.000	APBD
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan dan material yang disediakan	Kab. Malinau	18 jenis	200.000.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Malinau	15 kali	1.502.225.915	APBD

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Malinau	6 paket	199.930.300	APBD
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Malinau	12 unit	629.763.312	APBD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Malinau	12 laporan	4.876.760.004	APBD
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Malinau	12 laporan	382.581.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Malinau	12 Laporan	94.988.380.231	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kab. Malinau	70 unit	361.096.000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung/kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Malinau	6 unit	211.797.000	APBD
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kab. Malinau	7 Unit	1.638.461.250	APBD
	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah					
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah yang disediakan	Kab. Malinau	12 paket	1.311.115.000	APBD
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah yang disediakan	Kab. Malinau	12 paket	191.010.000	APBD
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	Kab. Malinau	5 paket	255.633.000	APBD
					109.248.829.178	
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA						
1	Program Perekonomian dan Pembangunan					
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian					

	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Malinau	2 dokumen	100.000.000	APBD
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah laporan hasil pengendalian dan distribusi perekonomian	Kab. Malinau	3 laporan	20.520.000.000	APBD
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil	Kab. Malinau	1 dokumen	80.000.000	APBD
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, perdagangan	Kab. Malinau	1 dokumen	5.100.000.000	APBD
					25.800.000.000	
BAGIAN ORGANISASI						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Malinau	1 laporan	30.000.000	APBD
	Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Malinau	1 laporan	24.000.000	APBD
	Penataan Organisasi					
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah dokumen pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	Kab. Malinau	3 dokumen	350.000.000	APBD
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah laporan hasil fasilitasi pelayanan public dan tata laksana	Kab. Malinau	2 laporan	125.000.000	APBD
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan reformasi birokrasi	Kab. Malinau	5 dokumen	121.000.000	APBD
	Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan public dan tata laksana	Kab. Malinau	3 dokumen	300.000.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan koordinasi dan penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah	Kab. Malinau	3 dokumen	250.000.000	APBD
					1.200.000.000	
BAGIAN HUKUM						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan peralatan dan perlengkapn kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Malinau	2 paket	17.000.000	APBD
	Penyediaan Bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Kab. Malinau	10 paket	25.000.000	APBD

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	Kab. Malinau	10 paket	20.000.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Malinau	10 laporan	70.000.000	APBD
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum					
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah produk hukum daerah yang ditetapkan	Kab. Malinau	3 dokumen	173.000.000	APBD
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah penanganan perkara hukum Pemda dan jumlah bantuan hukum serta pelaksanaan Ranham dan Kabupaten Kota Peduli Ham	Kab. Malinau	1 kasus	200.000.000	APBD
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah penyebaran informasi produk hukum melalui website dan pelaksanaan penyuluhan hukum	Kab. Malinau	3 dokumen	195.000.000	APBD
					700.000.000	
BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Kab. Malinau	1 paket	8.249.807	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Malinau	1 paket	7.200.000	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah					
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah kendaraan Dinas Oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perijinanya	Kab. Malinau	4 unit	20.070.000	APBD
2	Program Perekonomian dan Pembangunan					
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik					
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Kab. Malinau	12 dokumen	172.353.000	APBD
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil layanan pengadaan secara elektronik	Kab. Malinau	12 dokumen	310.205.553	APBD
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Kab. Malinau	14 orang	381.921.640	APBD
					900.000.000	
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					

	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Malinau	7 paket	58.500.000	APBD
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kab. Malinau	15 paket	12.600.000	APBD
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kab. Malinau	8000 dokumen	9.000.000	APBD
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Malinau	8 Laporan	131.800.000	APBD
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja SKPD dan ikhtisar laporan realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Malinau	72 Buku	56.500.000	APBD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Kab. Malinau	1 unit	17.600.000	APBD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian.verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penata usahaan dan pengujian/ verifikasi SKPD	Kab. Malinau	47 OPD	53.000.000	APBD
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Kab. Malinau	120 Buku	81.000.000	APBD
2	Program Perekonomian dan Pembangunan					
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan					
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi penyusunan program pembangunan daerah	Kab. Malinau	60 dokumen	100.000.000	APBD
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengendalian dan evaluasi program pembangunan	Kab. Malinau	15 laporan	142.000.000	APBD
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah laporan hasil pengelolaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan	Kab. Malinau	2 laporan	38.000.000	APBD
					700.000.000	
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN						
	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat					
	Adminstrasi Tata Pemerintahan					
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administrasi pemerintahan	Kab. Malinau	1 dokumen	150.000.000	APBD

	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	Kab. Malinau	1 dokumen	300.000.000	APBD
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	Kab. Malinau	2 dokumen	550.000.000	APBD
					1.000.000.000	
TOTAL					217.024.590.949	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan ini menggambarkan program/kegiatan 10 Bagian yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024 sebagai tahapan dalam proses perencanaan dan penganggaran serta sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RAPBD Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2024.

Secara umum, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bagian-Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau adalah untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing Bagian itu sendiri secara optimal sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau dan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan setiap kebijakan terutama dalam hal penganggarnya dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas-tugas pelayanan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Selanjutnya program dan kegiatan yang akan ditetapkan diharapkan dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan secara konsisten.

Malinau, 06 Juli 2023

Sekretaris Daerah
Kabupaten Malinau,



Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., MM
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19740914 199803 1 002